

BAB II

ANALISIS TINGKAT ANCAMAN TIONGKOK BAGI AUSTRALIA: AGGREGATE POWER & PROXIMITY

Berlandaskan pendahuluan pada bab sebelumnya, bab ini akan berupaya menjabarkan faktor-faktor terkait patokan Australia dalam melihat Tiongkok sebagai ancaman di kawasan berdasarkan pada pandangan M. Walt di landasan teori. Pertama-tama riset ini akan mengkaji terkait *Aggregate power* dan *Proximity* kedua negara yang kemudian digunakan untuk menilai apakah Tiongkok menjadi sumber ancaman bagi Australia di kawasan Pasifik Selatan.

2.1 *Aggregate Power*

Asumsi dari para realis dalam melihat negara berjuang untuk mencapai *power* adalah dengan meningkatkan hal-hal terkait ketahanan internal dan kapabilitas militer. Peralnya, jika sebuah negara gagal dalam membendung kekuatan hegemon lain yang menjadi potensial ancaman maka hal tersebut akan membahayakan negara dalam mencapai tujuan kedepan.

Aggregate power sendiri adalah penilaian terhadap kekuatan dari ancaman berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh negara ancaman tersebut. Dalam hal ini Australia melihat semakin besar sumber daya-sumber daya terkait yang dimiliki Tiongkok, maka akan semakin besar potensi ancaman yang ditimbulkan bagi negara Australia. Sumber daya ini di antaranya terkait populasi, kapabilitas militer serta alokasi dana pertahanan (Walt, 1985, p. 9).

Aggregate Power...-The greater a state's total resources (i.e., population, industrial and military capability, etc.), the greater a potential threat it can pose to others (Walt, 1985, p. 9).

Aggregate power atau kekuatan agregat secara umum dapat di dasari dari kekuatan populasi dan kapabilitas militer serta dana pertahanan. Kekuatan tersebut menjadi indikator dalam memperhitungkan kekuatan agregat. Hal ini karena semakin besar kekuatan suatu negara, maka akan semakin besar pula ancaman yang dapat diberikan oleh negara tersebut terhadap negara lainnya yang memiliki kekuatan yang lebih lemah atau rendah. Kekuatan agregat yang besar berbanding lurus dengan kekuatan untuk melakukan ancaman dan serangan.

Pertama, dalam hal melihat populasi yang dimiliki oleh Tiongkok dengan Australia. Dari segi populasi, dapat diperhatikan pada gambar populasi penduduk negara-negara dunia di bawah ini:

Tabel 2. 1 Posisi Populasi penduduk Tiongkok-Australia di dunia

Data Terkait Populasi	Tiongkok	Australia
Populasi tahun 2018 (Jiwa)	1.427.647.786	24.898.152
Area (Km ²)	9.706.961	7.692.024
Kepadatan Area	148/ Km ²	3/ Km ²
Tingkat pertumbuhan (Pertahun)	0,43%	1,23%
Peringkat di dunia	Ke-1	Ke-55

Sumber : (2019 World Population).

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa populasi dari Tiongkok berjumlah sekitar 1,4 Milyar jiwa penduduk dan menduduki posisi pertama negara dengan populasi terbanyak di dunia. Hal ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan Australia sendiri yang berada di posisi ke-55 dengan jumlah penduduk sebesar 24,8 juta jiwa penduduk. Meski pertumbuhan penduduk Australia lebih besar

dibanding Tiongkok yaitu 1,23% berbanding 0,43% namun berada di kuantitas yang jauh berbeda sehingga tidak memberikan pengaruh signifikan.

Kepemilikan terhadap jumlah penduduk yang besar oleh Tiongkok kemudian berhasil dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi dengan SDM yang melakukan pengembangan industri sehingga berhasil bersaing dengan industri-industri internasional dari negara lainnya termasuk Amerika Serikat dan Australia. Perkembangan industri menghasilkan keuntungan yang besar dan kemudian dialokasikan untuk pembangunan Tiongkok sehingga dapat mencapai kekuatan saat ini, sebuah masa di mana Tiongkok disebut *Rising of the Dragon*.

Perkembangan industri yang pesat memberikan keuntungan dan peningkatan dalam GDP. Pertumbuhan GDP yang dicapai Tiongkok sepanjang tahun 2013-2018 rata-rata adalah 6,46%. Sedangkan pertumbuhan GDP yang dicapai oleh Australia sepanjang tahun 2013-2018 adalah 0,98% (WorldBank, 2019). Tiongkok sedang berada di pertumbuhan GDP yang stabil di atas 5% dan ini membantu menaikkan pamor Tiongkok sebagai negara yang mengalami kemajuan dalam ekonomi dibandingkan Australia di beberapa negara di kawasan Pasifik Selatan.

Selanjutnya, populasi juga mempengaruhi ketersediaan sumber daya manusia di bidang militer bagi kedua negara, dalam hal ini ketersediaan pasukan tempur. Dengan menempati populasi terbesar di dunia, Tiongkok juga memiliki pasukan tempur dengan jumlah yang besar dan ini berarti potensi yang besar dalam memenangkan konflik maupun perang. Ketersediaan pasukan tempur kedua negara dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2. 2 Angka Pasukan Militer Tiongkok-Australia

Pasukan Militer	Tiongkok	Australia
SDM yang tersedia	755,855,402	10,808,002
Siap Melayani Negara	621,105,706	8,888,501
Mencapai Usia Militer	19,614,518	282,654
Total Personil Militer	2,693,000 (est.)	79,700 (est.)
Personil Aktif	2,183,000	60,000
Personil Cadangan	510,000	19,700

Dalam hal industri dan kapabilitas militer berdasarkan riset dari *GFP-global listing* (Global Fire Power), Tiongkok berada di posisi ke-3 negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia berdasarkan PwrIndx rating 0.00673 (0.000 *being perfect*). Sedangkan Australia berada di posisi ke-19 negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia berdasarkan PwrIndx rating 0.3277 (0.000 *being perfect*). Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan yang cukup jauh *head to head* antara kekuatan militer Tiongkok dengan Australia (GFP).

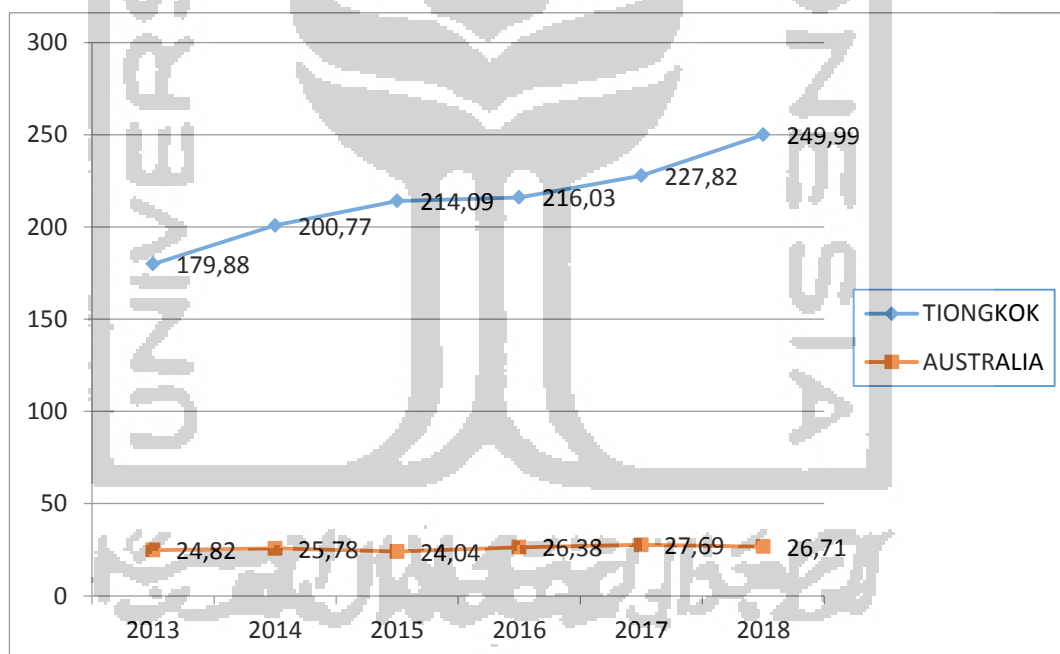
Selanjutnya dalam hal alokasi dana pertahanan negara yang tepat dan kondusif dapat memberikan kemajuan yang stabil terhadap pertahanan dan militer. Hal ini terkait dengan tujuan negara untuk pembangunan dan ekonomi nasional jangka panjang yang stabil, hingga kesiapan merespon berbagai perubahan kompleks dalam lingkungan politik dalam dan luar negeri membutuhkan tentara modern yang kuat (Wang, 2019, p. 188).

Tiongkok mengalami peningkatan yang signifikan dalam alokasi dana pertahanan tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah, dari tahun 2013 alokasi dana pertahanan Tiongkok sebesar 179,88 juta USD dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan mencapai sekitar 250 juta USD. Sedangkan alokasi

dana pertahanan Australia berkisar 24,8 juta USD pada tahun 2010 dan meningkat sedikit pada tahun 2018 menjadi 26,7 juta USD (SIPRI, 2019).

Tabel 2. 3 Dana pertahanan Tiongkok dan Australia periode 2013-2018

Alokasi Dana Pertahanan (Tahun)	Tiongkok (Juta USD)	Australia (Juta USD)
2013	179,88	24,82
2014	200,77	25,78
2015	214,09	24,04
2016	216,03	26,38
2017	227,82	27,69
2018	249,99	26,71



Gambar 2. 1 Grafik Tren alokasi dana pertahanan Tiongkok dan Australia periode 2013-2018

Dari data Gambar 2.1, dapat dilihat peningkatan signifikan dalam alokasi dana pertahanan Tiongkok sejak tahun 2013-2018. Hal ini berbanding terbalik dengan Australia yang sepanjang 2013-2018 hanya stagnan di kisaran 24-27 juta

USD. Alokasi dana yang besar dalam militer dan teknologi berimbas pada kenaikan kekuatan Tiongkok dalam hal kemiliteran.

Berbagai perbandingan antara Australia dan Tiongkok di atas terkait dengan populasi, SDM, Pertumbuhan GDP serta alokasi dana pertahanan memperlihatkan bahwa *aggregate power* Tiongkok lebih superior dibandingkan Australia. *Aggregate power* Tiongkok yang besar sejalan dengan potensi ancaman yang dapat diberikan kepada Australia dalam bersaing pengaruh di kawasan Pasifik Selatan.

2.2 *Proximity*

Faktor kedua yaitu *proximity* atau kedekatan posisi geografis, juga menjelaskan bahwa ancaman dari suatu negara terhadap negara lain dapat dilihat dari kedekatan geografis. Dalam hal ini ancaman dilihat dari posisi dan kekuatan ancaman terdekat yang berhubungan dengan negara ancaman utama yang dapat menunjukkan pergerakan potensial apabila diperhatikan secara baik oleh negara yang terancam. Semakin dekat jarak antar sebuah negara maka semakin besar pula potensi ancaman yang dapat diberikan oleh negara tersebut terhadap negara lain (Walt, 1985, pp. 10-11).

Proximate Power...- States will also align in response to threats from proximate power. Because the ability to project power declines with distance, states that are nearby pose a greater threat than those that are far away (Walt, 1985, p. 10).

Waltz juga menjelaskan *proximity* dengan menggunakan contoh kasus ketika perang dingin antara Uni Soviet-Amerika Serikat. Uni Soviet digambarkan sebagai posisi yang lebih lemah dibandingkan Amerika dalam hal persebaran pivot atau poros kekuatan, karena Uni Soviet yang dianggap sebagai kekuatan terbesar di Eurasia dianggap memberikan ancaman yang besar bagi negara-negara

yang berbatasan dengannya. Negara-negara di perbatasan ini umumnya bersifat imperial atau hanya dikendalikan oleh Uni Soviet sebatas *de facto*, lebih memilih untuk menjalin kerja sama dengan Amerika sehingga semakin meningkatkan ancaman bagi Uni Soviet (Walt, 1985, p. 36). Dalam hal ini, meskipun jarak antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat secara geografis jauh, namun Amerika tetap dapat memberikan ancaman kepada Uni Soviet dengan mempengaruhi negara-negara yang berbatasan secara langsung dengan Uni Soviet tersebut untuk melemahkan kekuatan Uni Soviet.

Dari segi *proximity* yang berpeluang menjadi ancaman bagi Australia adalah kedekatan hubungan yang dibangun oleh Tiongkok terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan berpotensi menjadi seperti kedekatan Tiongkok-Asia Tenggara termasuk yang terdekat yaitu Indonesia, yang notabene tergabung dalam ASEAN.

Dalam lingkup bilateral Tiongkok menjalin kerja sama dengan Indonesia, Malaysia, Kamboja, Laos, Filipina dan lainnya. Baik dari segi *ASEAN Regional Forum*, *China-ASEAN Free Trade Area*, *ASEAN+3*, hingga kerja sama lingkup bilateral yang telah dibangun oleh Tiongkok ini menunjukkan besarnya peningkatan *'soft power'* Tiongkok di Asia Tenggara. Tiongkok tidak lagi dipandang sebagai sebuah ancaman namun dipandang sebagai mitra kerja sama yang memberikan peluang untuk memperkuat kondisi negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Poros atau *Pivot* yang terbentuk dari hubungan kerja sama intens yang dibangun oleh Tiongkok di wilayah Asia Tenggara menjadikan hal ini menjadi sebuah ancaman bagi Australia karena negara-negara ini berada langsung di

selatan dari Australia. Tindakan Australia yang menunjukkan sikap kecemasan akan kemungkinan ancaman yang dapat diberikan oleh tetangganya di Asia Tenggara dapat dilihat pada masa John Howard. John Howard merupakan Perdana Menteri Australia yang pada tahun 2004 mengeluarkan kebijakan zona 1000 mil yang disebut *AMIZ (Australian Maritime Identification Zone)*, yang mengharuskan pendeteksian dini dan penggalian informasi bagi siapapun yang memasuki 1000 mil dari lepas pantai Australia (Country Profile: Australia, 2005, p. 6). Kebijakan ini diambil Howard untuk menjamin keamanan masyarakat Australia dari adanya ancaman-ancaman yang dapat diberikan oleh pendatang yang berasal dari luar wilayah Australia terutama pendatang dari utara Australia, namun kebijakan ini mendapat pertentangan dari Indonesia karena dianggap melanggar kedaulatan.

Kebijakan lain yang diambil oleh pemerintahan Australia dan kemudian mendapat pertentangan dari Tiongkok dan negara-negara di Asia Tenggara adalah penandatanganan nota kesepahaman dalam hal pertahanan misil pada Juli 2004 dengan program kerja sama pengembangan *Standard Missile 3* atau SM-3. SM-3 ini merupakan program kerja sama Australia-Amerika Serikat untuk memerangi terorisme dengan cara meningkatkan persenjataan misil, namun kritikan diberikan oleh Tiongkok-Asia Tenggara karena ditakutkan akan memicu perlombaan senjata dan memperbesar peluang terjadinya perang (Alami, et al., 2016, pp. 105-108).

Salah satu negara terdekat Australia yang berada di wilayah Asia Tenggara dan memiliki hubungan cukup baik dengan Tiongkok adalah Indonesia. Di era Presiden Joko Widodo, Tiongkok terlibat aktif dalam proyek infrastruktur di Indonesia yang meliputi pembangunan pelabuhan, pelabuhan udara, pembangunan

jalan, rel kereta api hingga *powerplan* berkapasitas 35 ribu megawatt (Humas Setkab, 2015). Hubungan baik yang dibangun oleh Tiongkok dengan Indonesia berjalan cukup lancar dan kedua negara kerap menjadi mitra kerja sama dalam berbagai bidang, sedangkan hubungan yang dibangun oleh Australia dengan Indonesia seringkali mengalami kondisi naik-turun. Peristiwa-peristiwa seperti bom Bali, penyadapan terhadap eksekutif pemerintah Indonesia oleh Australia, kebijakan AMIZ hingga kebijakan *Turn back the boat* yang berkaitan dengan imigran yang ditolak Australia kemudian dikirim ke perairan Indonesia menunjukkan konflik yang seringkali terlibat di antara kedua negara.

Hal ini dapat dilihat sebagai sikap tegas pada pemerintahan Australia yang ingin mengamankan wilayahnya dari masuknya hal-hal yang buruk yang berpotensi mengancam stabilitas Negara, dan kegiatan spionase dilakukan untuk menjamin tingkat keamanan yang lebih baik. Dilihat dari sisi realis, kedekatan hubungan yang dibangun oleh Tiongkok terhadap Indonesia dan negara lain di wilayah Asia Tenggara berpotensi menjadi poros pengaruh kekuatan Tiongkok yang bisa mengancam Australia secara langsung. Karena negara seperti Indonesia secara tradisional sulit dihadapi, sangat dekat dan berpotensi mengancam Australia (Walsh, 2018).

Poros kekuatan dan pengaruh Tiongkok yang berhasil dibangun di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia yang berada di utara Australia, memberikan tekanan kepada pemerintah Australia terkait keamanan wilayah dan secara tidak langsung meningkatkan pamor Tiongkok di mata para pemimpin negara-negara kecil di kawasan Pasifik Selatan. Dengan kata lain, potensi ancaman bagi Australia berdasarkan *proximity* yang awalnya hanya bersumber dari hubungan

Tiongkok-Indonesia bisa bertambah berdasarkan hubungan yang dibangun oleh Tiongkok-Kepulauan Pasifik Selatan. Hal ini karena Tiongkok juga berhasil dalam memperkuat pengaruhnya di kawasan dan menjadikan negara-negara seperti Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon, Samoa dan lainnya sebagai poros baru mitra kerja sama Tiongkok, maka negara-negara kecil ini yang memiliki jarak geografis yang lebih dekat dengan Australia sehingga semakin meningkatkan ancaman bagi keamanan Australia sebagai perwakilan Amerika Serikat di Pasifik Selatan.

